



Penguatan Identitas Kewargaan Melalui Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal

(Studi Kasus di Kabupaten Gorontalo)

Faradiba Azzahra^{1*}, Roni Lukum², Fidya Ramadhani Abdullah Dede³, Nurinda Ibrahim⁴, Eka Haspy Mulbiyanti⁵

¹⁻⁵Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo

*Korespondensi penulis: faradibaazzahra858@gmail.com¹

Abstract. *This article discusses strengthening civic identity through multicultural education based on local wisdom in Gorontalo Regency. The main problem raised is how local culture, although recognized as a symbol of regional identity, has not been fully translated into an inclusive and reflective pedagogical design to shape students' civic awareness. This study uses a qualitative case study design based on document analysis, with data sources in the form of indexed journal articles, regional official publications, and educational documents published in 2021–2026. The focus of the study is directed at educational practices in Limboto and Dungaliyo. The data was selected purposively based on relevance, credibility, and thematic proximity, then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show three main findings: first, huyula local wisdom as the value of mutual cooperation, solidarity, and collective responsibility functions as a cultural bridge that connects social diversity with civic disposition. Second, multicultural education is more effective when local values are explicitly integrated into classroom interactions, school habituation, collaborative work, and reflective discussions. Third, challenges arise because many local values are still implicitly practiced so that they have not yet formed a reflective citizenship consciousness. This article concludes the need for a shift from symbolic recognition to structured pedagogical design through curriculum contextualization, teacher mediation, and school-to-community partnerships.*

Keywords: *Citizenship Identity; Gorontalo Regency; Huyula Value; Local Wisdom; Multicultural Education*

Abstrak. Artikel ini membahas penguatan identitas kewargaan melalui pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal di Kabupaten Gorontalo. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana budaya lokal, meskipun diakui sebagai simbol identitas daerah, belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam desain pedagogis yang inklusif dan reflektif untuk membentuk kesadaran kewargaan peserta didik. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif berbasis analisis dokumen, dengan sumber data berupa artikel jurnal terindeks, publikasi resmi daerah, dan dokumen pendidikan yang terbit pada 2021–2026. Fokus kajian diarahkan pada praktik pendidikan di Limboto dan Dungaliyo. Data dipilih secara purposif berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kedekatan tematik, lalu dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan tiga temuan utama: pertama, kearifan lokal huyula sebagai nilai gotong royong, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif berfungsi sebagai jembatan kultural yang menghubungkan keragaman sosial dengan disposisi kewargaan. Kedua, pendidikan multikultural lebih efektif ketika nilai lokal diintegrasikan secara eksplisit ke dalam interaksi kelas, pembiasaan sekolah, kerja kolaboratif, dan diskusi reflektif. Ketiga, tantangan muncul karena banyak nilai lokal masih dipraktikkan secara implisit sehingga belum membentuk kesadaran kewargaan reflektif. Artikel ini menyimpulkan perlunya pergeseran dari pengakuan simbolik menuju desain pedagogis terstruktur melalui kontekstualisasi kurikulum, mediasi guru, dan kemitraan sekolah dengan masyarakat.

Kata kunci: Identitas Kewargaan; Kabupaten Gorontalo; Kearifan Lokal; Nilai Huyula; Pendidikan Multikultural

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang dibangun di atas keragaman etnis, agama, bahasa, dan tradisi lokal. Dalam konteks demikian, pendidikan multikultural tidak dapat dipahami sekadar sebagai wacana normatif tentang toleransi, melainkan sebagai proses pedagogis yang menyiapkan peserta didik agar mampu hidup bersama secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab. Kajian meta-analisis menunjukkan bahwa paradigma pendidikan

multikultural di Indonesia bertumpu pada tema-tema utama seperti kesatuan dalam keberagaman, kesetaraan, identitas budaya, dan keadilan social (Jayadi et al., 2022). Pada saat yang sama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai mandat khusus untuk menanamkan kesadaran kewargaan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan orientasi pada kehidupan bersama dalam negara demokratis (Hidayah et al., 2024).

Dalam perkembangan mutakhir, identitas kewargaan tidak cukup dipahami sebagai status legal sebagai warga negara. Identitas kewargaan mencakup kesadaran akan nilai kebangsaan, komitmen terhadap kehidupan demokratis, keterbukaan pada perbedaan, dan kesiapan berpartisipasi dalam ruang publik. Dalam konteks pendidikan, identitas ini tumbuh melalui pengalaman belajar yang menghubungkan nilai, pengetahuan, dan praktik sosial secara sekaligus (Abs, 2021). Karena itu, penguatan identitas kewargaan akan lebih efektif apabila dibangun secara kontekstual, dekat dengan pengalaman hidup peserta didik, dan berakar pada kebudayaan yang mereka kenal.

Kabupaten Gorontalo menyediakan konteks yang penting untuk kajian ini. Publikasi resmi daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah yang terus berkembang secara sosial, ekonomi, dan kelembagaan, sehingga pendidikan dituntut untuk tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga berpijak pada basis sosial-budaya masyarakat setempat (BPS Kabupaten Gorontalo, 2025). Dalam konteks Gorontalo, nilai-nilai lokal seperti huyula, musyawarah, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap kehidupan bersama bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga sumber pedagogis yang dapat diolah dalam pendidikan kewarganegaraan (Yunus, 2014).

Sejumlah penelitian mutakhir memperlihatkan bahwa integrasi kearifan lokal dapat memperkaya pendidikan multikultural. Ngiu, Laila, Panai, Yunus, dan Cuga (2023) menunjukkan bahwa pendekatan kearifan lokal dalam lingkungan sekolah multikultural dapat memperkuat kesadaran kewargaan, partisipasi siswa, dan sikap saling menghormati. Rahmawati, Sutrisno, dan Fianisa (2024) menegaskan bahwa tradisi lokal dapat berfungsi sebagai medium konkret untuk menanamkan nilai kebersamaan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Di sisi lain, Setiawan, Purnomo, Marzuki, Charismana, dan Zaman (2024) memperlihatkan bahwa nilai toleransi akan lebih bertahan ketika diintegrasikan ke dalam kultur sekolah dan interaksi sehari-hari, bukan hanya diajarkan sebagai konsep abstrak.

Pada level lokal Gorontalo, temuan yang lebih spesifik juga sudah mulai bermunculan. Sabidullah, Yunus, dan Wantu (2025) menemukan bahwa penguatan nilai huyula dalam pembelajaran PPKn di SMP Negeri 4 Satap Dungaliyo mendukung pembentukan karakter, kebersamaan, dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam membaca persoalan sosial. Yunus,

Kamuli, dan Midu (2025) memperlihatkan bahwa penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di SMA Negeri 1 Gorontalo mendorong kesadaran budaya dan lingkungan belajar yang lebih kolaboratif. Sementara itu, Adjie, Yunus, Wantu, dan Mawahda (2026) menemukan bahwa nilai huyula masih hidup dalam praktik sosial siswa di SMK Negeri 1 Limboto, tetapi belum seluruhnya terinternalisasi sebagai kesadaran karakter yang reflektif. Temuan Bunta, Sarina, Wicaksono, dan Dotutinggi (2026) juga menunjukkan bahwa kesadaran multikultural siswa di Gorontalo banyak dibentuk melalui praktik sosial berbasis kearifan lokal, walaupun masih menghadapi tantangan berupa relasi eksklusif dan lemahnya refleksi nilai.

Meskipun demikian, ada celah kajian yang masih terlihat. Sebagian penelitian membahas pendidikan multikultural secara umum, sebagian lain mengulas kearifan lokal sebagai pendidikan karakter, dan sebagian lainnya melihat sekolah multikultural tanpa secara khusus menghubungkannya dengan identitas kewargaan sebagai keluaran utama PPKn. Dengan kata lain, belum banyak studi yang secara terfokus membaca bagaimana pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal bekerja sebagai mekanisme penguatan identitas kewargaan dalam konteks Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan celah tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis penguatan identitas kewargaan melalui pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal dengan studi kasus pada konteks pendidikan di Kabupaten Gorontalo.

2. KAJIAN TEORITIS

Secara konseptual, identitas kewargaan adalah konstruksi kesadaran yang membuat seseorang memahami dirinya sebagai bagian dari komunitas politik yang lebih luas, memiliki hak dan kewajiban, serta bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan bersama. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas kewargaan tidak cukup dibentuk melalui hafalan norma atau simbol negara, tetapi melalui proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menghayati nilai Pancasila, demokrasi, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman (Sunarso et al., 2024; Purwadi, Saliman, & Umar, 2024).

Pendidikan multikultural, pada sisi lain, merupakan pendekatan pendidikan yang menempatkan perbedaan sebagai realitas sosial yang harus dikenali, dipahami, dan dikelola secara adil. Pendidikan multikultural berupaya mendorong keterbukaan, kesetaraan, penghormatan terhadap identitas budaya, serta kemampuan hidup bersama dalam ruang yang majemuk (Jayadi et al., 2022; Widiatmaka, Hidayat, Yapandi, & Rahnang, 2022). Dalam konteks PPKn, pendidikan multikultural relevan karena ia memperluas cakupan pembelajaran

kewarganegaraan dari sekadar relasi negara dan warga menuju relasi antarmanusia dalam masyarakat yang plural.

Kearifan lokal merupakan sistem nilai, pengetahuan, dan praktik sosial yang lahir dari pengalaman panjang suatu komunitas dalam menata kehidupan bersama. Dalam perspektif pendidikan, kearifan lokal penting bukan hanya karena fungsi pelestarian budaya, tetapi karena ia menyediakan landasan moral dan sosial yang kontekstual bagi proses belajar. Yunus (2014) menempatkan huyula sebagai salah satu local genius Gorontalo yang menegaskan nilai gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas sosial. Dalam penelitian-penelitian mutakhir, nilai lokal seperti ini terbukti dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran untuk memperkuat karakter, budaya sekolah, dan sikap kewargaan (Sakti, Endraswara, & Rohman, 2024; Sitorus, Barasa, Sihaloho, Manik, & Halawa, 2024).

Hubungan antara pendidikan multikultural, kearifan lokal, dan identitas kewargaan dapat dijelaskan sebagai hubungan yang saling menopang. Pendidikan multikultural memberi arah normatif agar keberagaman dihormati; kearifan lokal menyediakan basis kultural yang dekat dengan kehidupan siswa; sedangkan identitas kewargaan menjadi hasil yang diharapkan berupa tumbuhnya orientasi kebangsaan yang inklusif. Temuan Rahmawati et al. (2024) menunjukkan bahwa tradisi lokal dapat menjadi medium internalisasi nilai toleransi dan kebersamaan. Ngiu et al. (2023) juga menegaskan bahwa sekolah multikultural akan lebih efektif mengembangkan civic awareness ketika keberagaman dikelola melalui nilai lokal yang hidup dalam komunitas. Dengan demikian, pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal dapat diposisikan sebagai strategi pedagogis untuk membentuk warga muda yang berakar pada budaya sendiri, tetapi tetap terbuka terhadap perbedaan dan kehidupan demokratis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa persoalan penguatan identitas kewargaan melalui pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui angka semata, melainkan harus dibaca sebagai proses sosial, pedagogis, dan kultural yang berlangsung dalam konteks tertentu. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam satu konteks terikat, yaitu Kabupaten Gorontalo, dengan fokus pada praktik pendidikan yang merepresentasikan integrasi nilai lokal dalam pembelajaran dan budaya sekolah (Yin, 2018).

Sumber data penelitian berupa dokumen primer dan sekunder.

- a. Dokumen primer mencakup artikel ilmiah yang secara langsung membahas praktik pendidikan berbasis kearifan lokal di Gorontalo, terutama pada satuan pendidikan di Limboto dan Dungaliyo, seperti karya Sabidullah et al. (2025), Yunus et al. (2025), Adjie et al. (2026), dan Bunta et al. (2026).
- b. Dokumen sekunder meliputi artikel konseptual dan hasil penelitian relevan tentang pendidikan multikultural, identitas kewargaan, serta pendidikan berbasis kearifan lokal di Indonesia, termasuk publikasi Jayadi et al. (2022), Ngiu et al. (2023), Rahmawati et al. (2024), Setiawan et al. (2024), dan Sunarso et al. (2024). Publikasi resmi BPS Kabupaten Gorontalo (2025) dan rujukan UNESCO tentang global citizenship education juga digunakan untuk memperkuat pembacaan konteks dan implikasi pendidikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan teknik purposive sampling. Dokumen dipilih berdasarkan empat kriteria, yaitu relevansi langsung dengan tema penelitian, keterpercayaan sumber, kedekatan dengan konteks Gorontalo, dan keterbaruan terbitan. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. Keabsahan data ditempuh melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori, yakni dengan mempertemukan dokumen empiris lokal, kerangka pendidikan multikultural, serta perspektif pendidikan kewarganegaraan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menunjukkan pola, tantangan, dan implikasi penguatan identitas kewargaan di Kabupaten Gorontalo.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan ini disusun berdasarkan proses pengumpulan dan seleksi dokumen yang dilakukan secara bertahap melalui penelusuran artikel ilmiah, publikasi resmi daerah, dan dokumen pendidikan yang relevan. Rentang dokumen yang dianalisis terutama berasal dari publikasi tahun 2021-2026, sedangkan fokus lokasi kajian berada di Kabupaten Gorontalo dengan penekanan pada konteks pendidikan di Limboto dan Dungaliyo. Melalui proses tersebut, diperoleh pola temuan yang menunjukkan keterkaitan kuat antara kearifan lokal, pendidikan multikultural, dan pembentukan identitas kewargaan.

Basis Kearifan Lokal dalam Konteks Pendidikan Multikultural Kabupaten Gorontalo

Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan identitas kewargaan di Kabupaten Gorontalo mempunyai titik tolak yang kuat pada nilai-nilai lokal yang masih hidup dalam praktik sosial masyarakat. Pada konteks Gorontalo, huyula menempati posisi penting karena

memuat semangat kerja sama, saling membantu, solidaritas, dan tanggung jawab bersama. Nilai ini tidak berhenti sebagai simbol budaya, tetapi tampak dalam kegiatan kolektif di lingkungan sekolah, baik dalam kerja kelompok, kegiatan kebersihan, maupun pola hubungan sosial antarsiswa (Adjie et al., 2026; Sabidullah et al., 2025).

Selain huyula, konteks Kabupaten Gorontalo juga memperlihatkan keberadaan komunitas dan tradisi sosial yang beragam. Kajian tentang toponimi Bondaraya memperlihatkan bahwa penamaan ruang dan memori sosial masyarakat Gorontalo berkelindan dengan unsur pengetahuan lokal dan identitas budaya (Baruadi, Eraku, Napu, & Hendra, 2024). Temuan tersebut penting karena identitas kewargaan yang kuat pada dasarnya tidak dibangun dengan menghapus identitas lokal, melainkan dengan menempatkan identitas lokal sebagai dasar untuk memahami keberadaan diri dalam komunitas politik yang lebih luas. Dengan demikian, budaya lokal tidak menjadi penghalang integrasi nasional, tetapi justru memperkaya pengalaman kewargaan.

Dalam konteks pendidikan multikultural, temuan ini menegaskan bahwa sekolah di Kabupaten Gorontalo memiliki modal budaya yang konkret untuk mengembangkan pembelajaran yang inklusif. Ketika kearifan lokal diperlakukan sebagai sumber belajar, peserta didik tidak hanya diajak mengenal budaya sendiri, tetapi juga belajar bahwa kehidupan bersama menuntut sikap saling menghormati, mendengar, dan bekerja sama. Dari sini, identitas kewargaan berkembang sebagai identitas yang berakar secara kultural sekaligus terbuka secara sosial.

Tabel 1. Pemetaan Nilai Kearifan Lokal dan Penguatan Identitas Kewargaan.

Nilai kearifan lokal	Manifestasi dalam pendidikan multikultural	Dimensi identitas kewargaan yang diperkuat	Implikasi pedagogis
Huyula	Kerja bersama, saling membantu, pembiasaan gotong royong, dan penyelesaian tugas secara kolektif di sekolah.	Kerja sama, kepedulian sosial, tanggung jawab publik, dan rasa memiliki terhadap komunitas belajar.	Nilai lokal perlu dihubungkan langsung dengan kegiatan kelas, proyek sekolah, dan pembelajaran PPKn.
Musyawahar dan penghargaan pada pendapat	Diskusi kelas, penyusunan kesepakatan belajar, dan pengambilan keputusan bersama.	Kesadaran demokratis, penghormatan terhadap perbedaan, dan kemampuan berpartisipasi secara setara.	Guru perlu memfasilitasi ruang dialog yang memberi tempat pada semua suara siswa.

Nilai kearifan lokal	Manifestasi dalam pendidikan multikultural	Dimensi identitas kewargaan yang diperkuat	Implikasi pedagogis
Penghormatan identitas budaya	Pengakuan terhadap latar belakang siswa, kebiasaan lintas kelompok, dan interaksi yang tidak diskriminatif.	Sikap inklusif, pengakuan atas martabat orang lain, dan keterbukaan terhadap kemajemukan.	Materi PPKn dan kegiatan sekolah harus menampilkan keberagaman sebagai kenyataan yang setara.
Tanggung jawab sosial	Keterlibatan siswa dalam kegiatan kebersihan, pelestarian budaya, dan relasi sekolah dengan masyarakat.	Orientasi pada kepentingan umum dan partisipasi sosial sebagai bagian dari kewargaan aktif.	Sekolah perlu membangun kemitraan dengan keluarga, desa, dan komunitas budaya.

Sumber: Diolah penulis dari Sabidullah et al. (2025), Yunus et al. (2025), Adjie et al. (2026), dan Bunta et al. (2026).

Tabel 1 memperlihatkan bahwa nilai kearifan lokal di Kabupaten Gorontalo dapat dipetakan langsung ke dalam dimensi identitas kewargaan. Artinya, pendidikan multikultural akan lebih efektif ketika sekolah tidak memisahkan budaya lokal dari pembelajaran kewarganegaraan. Nilai lokal justru menyediakan bahasa sosial yang lebih dekat dengan pengalaman siswa untuk memahami kebersamaan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap perbedaan.

Pola Penguatan Identitas Kewargaan Melalui Pendidikan Multikultural

Pola pertama yang tampak dari hasil kajian ialah internalisasi nilai melalui pembiasaan sosial. Di SMK Negeri 1 Limboto, nilai huyula tetap hidup dalam praktik sosial siswa, khususnya dalam kegiatan kolektif, saling membantu, dan solidaritas antaranggota sekolah (Adjie et al., 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa identitas kewargaan tidak selalu lahir dari penjelasan teoritis, tetapi kerap tumbuh dari pengalaman sosial yang berulang. Ketika peserta didik dibiasakan bekerja bersama tanpa membeda-bedakan latar belakang, mereka belajar mengenai kesetaraan, tanggung jawab, dan kepentingan bersama secara konkret.

Pola kedua adalah integrasi nilai lokal ke dalam pembelajaran PPKn secara kontekstual. Sabidullah et al. (2025) menunjukkan bahwa nilai huyula dalam pembelajaran PPKn di Dungaliyo tidak hanya relevan untuk pembentukan karakter, tetapi juga untuk pengembangan kemampuan berpikir kritis. Hal ini penting, sebab identitas kewargaan yang kuat bukan hanya identitas yang patuh, melainkan identitas yang mampu menimbang persoalan sosial, mengambil keputusan moral, dan terlibat secara sadar dalam kehidupan publik. Dengan kata

lain, pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal tidak mengurangi daya kritis PPKn, justru memperkaya konteksnya.

Pola ketiga adalah penguatan melalui budaya sekolah. Penelitian Yunus et al. (2025) memperlihatkan bahwa penguatan karakter berbasis kearifan lokal mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kolaboratif dan saling menghargai. Temuan serupa juga muncul dalam penelitian Ngiu et al. (2023), yang menegaskan bahwa sekolah multikultural akan lebih inklusif ketika keberagaman dikelola melalui ritual, interaksi, dan sistem pendidikan yang egaliter. Dalam kerangka ini, identitas kewargaan terbentuk bukan hanya melalui isi kurikulum, tetapi melalui kultur kelembagaan yang menempatkan semua warga sekolah sebagai subjek yang setara.

Pola keempat adalah perlunya refleksi nilai. Bunta et al. (2026) menunjukkan bahwa kesadaran multikultural siswa di Gorontalo banyak dibentuk oleh praktik sosial sehari-hari, tetapi masih cenderung bersifat implisit. Temuan ini mengingatkan bahwa pembiasaan sosial saja belum cukup. Agar menjadi identitas kewargaan yang matang, pengalaman kolektif itu harus diolah melalui refleksi, dialog, dan pemaknaan. Di sinilah peran guru PPKn menjadi sangat penting sebagai mediator yang membantu siswa menghubungkan pengalaman lokal dengan prinsip kewargaan yang lebih luas, seperti demokrasi, keadilan, dan kebhinekaan.

Tantangan Implementasi

Meskipun memiliki potensi yang kuat, implementasi pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal di Kabupaten Gorontalo masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, banyak nilai lokal masih hadir pada level praktik, tetapi belum diinstitutionalisasi secara konsisten ke dalam perangkat pembelajaran, perencanaan sekolah, dan evaluasi pembentukan karakter. Adjie et al. (2026) menegaskan bahwa keberadaan huyula di sekolah masih lebih banyak bertumpu pada dinamika sosial informal dibanding desain pendidikan yang terstruktur.

Kedua, tantangan pedagogis masih cukup nyata. Pembelajaran berbasis kearifan lokal menuntut guru memiliki kemampuan untuk menerjemahkan nilai budaya ke dalam pengalaman belajar yang reflektif, bukan sekadar seremonial. Jika nilai lokal hanya disampaikan sebagai slogan atau identitas simbolik, maka pendidikan multikultural berisiko menjadi dangkal. Temuan Setiawan et al. (2024) dan Rahmawati et al. (2024) menunjukkan bahwa integrasi nilai akan lebih bermakna ketika dirumuskan menjadi aktivitas kelas, kebiasaan sekolah, dan ruang dialog yang konkret.

Ketiga, perubahan sosial akibat modernisasi, media digital, dan relasi pergaulan yang semakin kompleks juga memengaruhi cara siswa memaknai identitas. Dalam situasi seperti ini, identitas kewargaan mudah bergeser menjadi identitas yang reaktif apabila sekolah tidak

menyediakan ruang penjernihan nilai. UNESCO menegaskan bahwa pendidikan kewargaan pada masa kini harus menolong peserta didik menjadi pribadi yang etis, empatik, dan mampu hidup bersama dalam dunia yang makin saling terhubung (UNESCO, n.d.). Karena itu, pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal perlu dirancang bukan sebagai romantisme masa lalu, melainkan sebagai strategi pendidikan yang relevan dengan tantangan zaman.

Implikasi Teoritis dan Terapan

Secara teoritis, hasil kajian ini menegaskan bahwa identitas kewargaan lebih kokoh apabila dibangun melalui perjumpaan antara nilai kebangsaan dan pengalaman budaya lokal. Temuan ini memperluas pembacaan bahwa PPKn tidak hanya berfungsi menyampaikan norma negara, tetapi juga mengolah sumber-sumber moral yang hidup dalam masyarakat agar menjadi basis kewargaan yang inklusif. Perspektif ini sejalan dengan kajian tentang strategi pendidikan kewargaan yang menekankan pentingnya relevansi kontekstual, pengembangan civic disposition, dan keterlibatan peserta didik dalam pengalaman sosial yang bermakna (Abs, 2021; Bosio, 2021).

Secara terapan, artikel ini memberikan beberapa implikasi. Pertama, sekolah perlu mengintegrasikan nilai lokal ke dalam tujuan, materi, metode, dan asesmen PPKn secara eksplisit. Kedua, budaya sekolah harus dirancang sebagai ruang pembiasaan yang konsisten, bukan hanya kegiatan insidental. Ketiga, kemitraan sekolah dengan keluarga, pemerintah desa, dan komunitas budaya perlu diperkuat agar internalisasi nilai tidak berhenti di ruang kelas. Keempat, guru perlu membangun mekanisme refleksi, misalnya melalui diskusi kasus, jurnal reflektif, atau proyek sosial, agar pengalaman kebersamaan siswa berkembang menjadi kesadaran kewargaan yang sadar nilai dan bertanggung jawab.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal mempunyai peran penting dalam penguatan identitas kewargaan di Kabupaten Gorontalo. Kearifan lokal, terutama huyula, terbukti menyediakan basis nilai yang dekat dengan pengalaman hidup peserta didik untuk menumbuhkan kerja sama, kepedulian sosial, penghormatan terhadap perbedaan, dan orientasi pada kepentingan bersama. Penguatan identitas kewargaan menjadi lebih efektif ketika nilai tersebut tidak berhenti sebagai simbol budaya, tetapi diintegrasikan secara eksplisit ke dalam pembelajaran PPKn, budaya sekolah, dan relasi sekolah dengan masyarakat. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tantangan masih muncul pada lemahnya institusionalisasi nilai lokal, terbatasnya mediasi pedagogis, dan belum optimalnya proses refleksi yang mengubah praktik sosial

menjadi kesadaran kewargaan yang matang. Oleh sebab itu, sekolah di Kabupaten Gorontalo disarankan untuk mengembangkan desain pembelajaran yang lebih kontekstual, memperkuat kapasitas guru dalam mengelola pendidikan multikultural berbasis budaya lokal, dan memperluas kolaborasi dengan keluarga serta komunitas budaya. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bertumpu pada analisis dokumen, sehingga belum menjangkau pengalaman langsung guru dan peserta didik di lapangan. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan observasi kelas dan wawancara mendalam agar dinamika implementasi dapat dibaca secara lebih rinci.

DAFTAR REFERENSI

- Abs, H. J. (2021). Options for developing European strategies on citizenship education. *European Educational Research Journal*, 20(3), 329–347. <https://doi.org/10.1177/1474904121994418>
- Adjie, Z., Yunus, R., Wantu, A. W., & Mawahda, N. (2026). The existence of Huyula local wisdom values in the character education of students at State Vocational High School 1 Limboto. *Journal of English Language and Education*, 11(2), 446–452. <https://doi.org/10.31004/jele.v11i2.2183>
- Baruadi, M. K., Eraku, S. S., Napu, N., & Hendra, H. (2024). Toponymy of Bondaraya Village, Gorontalo Province: A local wisdom study. *Journal of Language Teaching and Research*, 15(1), 301–309. <https://doi.org/10.17507/jltr.1501.33>
- BOSIO, E. (2021). Global human resources or critical global citizens? An inquiry into the perspectives of Japanese university educators on global citizenship education. *Prospects*, 53(3–4), 425–442. <https://doi.org/10.1007/s11125-021-09566-6>
- BPS Kabupaten Gorontalo. (2025). Kabupaten Gorontalo dalam angka 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo.
- Bunta, A. F., Sarina, S., Wicaksono, M. A., & Dotutinggi, S. J. (2026). Dynamics of forming multicultural awareness of students at SMKN 5 Gorontalo. *Journal of English Language and Education*, 11(2), 390–396. <https://doi.org/10.31004/jele.v11i2.2166>
- Jayadi, K., Abduh, A., & Basri, M. (2022). A meta-analysis of multicultural education paradigm in Indonesia. *Heliyon*, 8(1), e08828. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08828>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Ngiu, Z., Laila, N. Q., Panai, A. H., Yunus, R., & Cuga, C. (2023). Strengthening civic education in a multicultural school: A local wisdom approach. *Eurasian Journal of Educational Research*, 108, 213–228. <https://doi.org/10.14689/ejer.2023.108.012>
- Noe, W., Wardhani, N. W., Umar, S. H., & Yunus, R. (2021). Realizing multiculturalism and social integration in Banuroja community. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 82–96. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.37983>

- Purwadi, D., Saliman, S., & Umar, U. (2024). Metamorphosis of citizenship education: Ignizing national awareness of the younger generation. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(2), 206–213. <https://doi.org/10.21831/jc.v21i2.67153>
- Rahmawati, E. N., Sutrisno, C., & Fianisa, R. (2024). Multicultural education based on local wisdom in the perspective of civic education through the Nguras Enceh tradition. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(2), 311–320. <https://doi.org/10.21831/jc.v21i2.76678>
- Sabidullah, N., Yunus, R., & Wantu, S. M. (2025). Penguatan nilai kearifan lokal (Huyula) dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(2), 1562–1578. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i2.4099>
- Sakti, S. A., Endraswara, S., & Rohman, A. (2024). Revitalizing local wisdom within character education through ethnopedagogy approach: A case study on a preschool in Yogyakarta. *Heliyon*, 10, e31370. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e31370>
- Setiawan, A., Purnomo, P., Marzuki, M., Charismana, D. S., & Zaman, A. R. B. (2024). The implementation of tolerance values through multicultural education program. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(2), 332–341. <https://doi.org/10.21831/jc.v21i2.71337>
- Sitorus, M. H., Barasa, T., Sihalohe, M., Manik, S. S. A., & Halawa, I. (2024). Integration of Toba Batak local wisdom as character and multicultural education values in the curriculum. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(2), 353–368. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i2.1454>
- Sunarso, S., Hidayah, Y., Firmasnyah, A., & Arpanudin, I. (2024). Content analysis of Pancasila and Civic Education curriculum at the junior high school level in Indonesia: Philosophical perspectives in affirming civic identity. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(1), 98–106. <https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.63161>
- UNESCO. (n.d.). What you need to know about global citizenship education. Retrieved April 3, 2026, from <https://www.unesco.org/en/global-citizenship-peace-education/need-know>
- Widiatmaka, P., Hidayat, M. Y., Yapandi, Y., & Rahnang, R. (2022). Pendidikan multikultural dan pembangunan karakter toleransi. *JIPSINDO*, 9(2), 119–133. <https://doi.org/10.21831/jipsindo.v9i2.48526>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage.
- Yunus, R. (2014). Nilai-nilai kearifan lokal (local genius) sebagai penguat karakter bangsa: Studi empiris tentang Huyula. Deepublish.
- Yunus, R., Kamuli, S., & Midu, F. (2025). Pendidikan karakter bagi siswa berbasis kearifan lokal di SMA Negeri 1 Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 5(3). <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i3.1640>